ABSTRACT

Selama masa pemerintahan Joko Widodo terdapat permasalahan yang menghambat ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Hambatan ini didominasi oleh *non tariff barrier*s yang justru dapat mengurangi kuantitas ekspor lebih besar daripada *tariff barriers*. Meski kaitan nya erat dengan kasus lingkungan, isu kelapa sawit sering dikonstruksikan Uni Eropa sebagai hal yang tidak ramah lingkungan. Pembingkaian isu lingkungan terhadap kelapa sawit sebagai hal yang tidak berkelanjutan menjadi prioritas utama sebagai hambatan perdagangan sehingga memunculkan kekhawatiran pemerintah Indonesia untuk melakukan ekspor terhadap kelapa sawit. Berangkat dari latar belakang tersebut, skripsi ini berusaha untuk membahas upaya rasional pemerintah Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo dalam merespon bentuk hambatan ekspor kelapa sawit oleh Uni Eropa.

Keyword: *Kelapa Sawit, Indonesia, Uni Eropa*

During Joko Widodo government, there is a problem which is barrier export palm oil in Indonesia to European Union. This barrier is dominated by *non tariff barriers* which exactly can decrease quantity of export larger than *tariff barriers*. Although there is connection between environment case, sometimes palm oil issue is constructed by European Union as the thing which is not environmentally friendly. Framing of environment issue to palm oil as unsustainable thing become priority as trade barrier so that appear concern Indonesia government to do export to palm oil. From this issue, this thesis effort to examine the rational effort of Indonesia government in Joko Widodo period to respons trade export palm oil by European Union.

Keyword : *Palm Oil, Indonesia, European Union*